

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SISWA TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM UUD 1945

Oleh: Ahmad Soleh

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengembangkan instrumen penilaian baik aspek pengetahuan, sikap pada kompetensi lembaga-lembaga negara dalam UUD negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Untuk mengetahui kevalidan dan reliabilitas dari instrumen tersebut; dan (3) untuk mengetahui tingkat kepraktisan instrumen penilaian baik aspek pengetahuan, sikap pada kompetensi di atas.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Karangawen Kabupaten Demak. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 bulan. Adapun subyek yang dijadikan sasaran adalah siswa kelas 8. Penelitian ini menggunakan model pengembangan. Model penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi instrumen penilaian aspek sikap dan instrumen penilaian aspek pengetahuan. Langkah penelitian ini mengikuti pendapatnya Sugiyono, ada 10 langkah, namun penulis hanya melewati tahapan sampai 9 saja, dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga dari peneliti. Analisis dalam penelitian ini menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan oleh penulis. Untuk mengetahui validitas Isi dengan expect judgment.

Untuk mengetahui validitas konstruk ,instrumen dianalisis dengan analisis Confermatory Factor Analisis (CFA) dari program Lisrel. Untuk mengetahui reliabilitas Instrumen dikorelasikan dengan menggunakan rumus alpha Cronbach (α). Hasilnya Kondisi faktual guru PPKn di SMP Negeri 1 Karangawen belum dapat melaksanakan penilaian otentik. Untuk permasalahan 2 sampai 4 belum dapat diketahui hasilnya karena belum diadakan ujicoba.

Kata kunci: instrumen, kompetensi, lembaga-lembaga negara, penilaian.

Pendahuluan

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan kurikulum baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan kurikulum 2013. Keberadaan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006 dan KBK 2004. Dengan ditetapkannya kurikulum baru tentu saja membawa perubahan pada standar nasional pendidikan. Ada empat standar dari delapan standar yang mengalami perubahan. Standar yang mengalami perubahan yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan standar yang tidak mengalami perubahan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan.

Perubahan standar tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan materi dan mata pelajaran pada standar isi. Perubahan pendekatan dari kontekstual teaching and learning (CTL) menjadi pendekatan scientific. Perubahan dalam sistem penilaian, dalam kurikulum 2013 dikenal dengan sebutan penilaian otentik. Dengan adanya perubahan pada tiga standar menimbulkan perubahan pada standar kelulusan. Keempat standar itu mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga perubahan pada satu standar akan mempengaruhi standar yang lain pula.

Salah satu dari keempat standar yang mengalami perubahan adalah standar penilaian. Pada kurikulum 2013 sistem penilaiannya disebut dengan penilaian otentik. Penilaian otentik menurut Nurhadi adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Masrukan, 2014:19). Penilaian otentik

merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), *proses*, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Ruang lingkup penilaian meliputi tiga aspek yaitu aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Ketiga aspek itu pada dasarnya telah dilakukan oleh guru pada masa kurikulum 2006. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam penilaian antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Perbedaan dalam penilaiannya adalah pada masa menggunakan kurikulum 2006 terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentuk pengetahuan, pembentuk sikap dan pembentuk ketrampilan. Namun sekarang dengan kurikulum 2013 semua mata pelajaran berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Harapan bagi guru setelah diberlakukan kurikulum 2013 adalah semua guru dapat mengembangkan instrumen penilaian baik aspek pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Hal ini berbeda dengan kurikulum 2006 dimana masing-masing guru mata pelajaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya saja. Selain itu Sekarang ini semua guru juga harus mampu untuk melaksanakan penilaian secara komprehensif. Penilaian ini meliputi saat sebelum, saat proses maupun setelah selesai pembelajaran. Dari Hasil penilaian tersebut dijadikan bahan untuk menentukan nilai peserta didik.

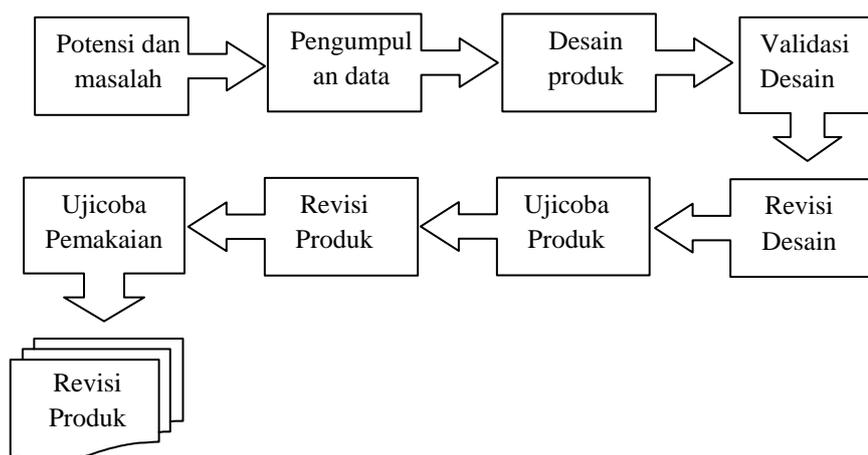
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam proses belajar mengajar. Kesenjangan tersebut adalah mayoritas guru di kabupaten Demak masih belum dapat mengembangkan dan melaksanakan penilaian pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan kurikulum 2013. Harapannya semua guru dapat mengembangkan dan melaksanakan penilaian aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan kurikulum 2013. Untuk membantu guru mengatasi masalah pengembangan instrumen dan pelaksanaan penilaian tersebut khususnya guru mata pelajaran PPKn, saya akan mengadakan penilaian pengembangan yang berjudul “ Pengembangan instrumen penilaian tentang kompetensi lembaga-lembaga negara dalam UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut.

- (1) Bagaimanakah bentuk faktual penilaian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 1 Karangawen ?
- (2) Apakah pengembangan instrumen penilaian materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia valid dan reliabel ?
- (3) Apakah instrumen penilaian yang telah dikembangkan mempunyai nilai kepraktisan ?
- (4) Bagaimanakah hasil / modul pengembangan instrumen yang telah dilakukan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pengembangan. Model penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi instrumen penilaian aspek sikap dan instrumen penilaian aspek pengetahuan. Langkah penelitian ini mengikuti pendapatnya Sugiyono, ada 10 langkah, namun penulis hanya melewati tahapan sampai 9 saja, dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga dari peneliti. Langkah-langkah model pengembangannya yaitu (1) potensi dan masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Perbaikan Desain, (6) Uji Coba Produk, (7) Revisi Produk, (8) Ujicoba Pemakaian, (9) Revisi Produk, (10) Sugiyono (2011: 298).



Gambar: Prosedur R & D

Desain uji coba dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu validasi desain, ujicoba produk, dan ujicoba pemakaian. Desain uji coba produk ini menggunakan desain deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Siswa SMP Negeri 1 Karangawen. Uji coba akan dilaksanakan dua kali. Uji coba pertama, penulis akan mengujicobakan kepada 34 siswa. Uji coba kedua, penulis akan mengujicobakan kepada 100 siswa.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengetahui hasil dari *treatment* atau perlakuan setelah instrument diujicobakan. Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, Rating scale dengan skala likert dan tes. Untuk instrumen wawancara, penulis gunakan untuk pada tahapan pengembangan pertama dan kedua yaitu pada tahap potensi dan masalah, serta pengumpul data. Hasil dari wawancara tersebut kemudian penulis gunakan untuk memformulakan mendesain instrumen tes yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian mata pelajaran PPKn. Rating scale dengan skala likert digunakan untuk mengetahui aspek sikap spiritual, sikap toleransi dan kedisiplinan. Sedangkan Tes digunakan untuk mengetahui kompetensi lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945. Bentuk tes adalah pilihan ganda

Analisis dalam penelitian ini menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan oleh penulis.

Landasan Teori

Diskripsi mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tidak ada salahnya penulis perkenalkan sejarah Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak Indonesia merdeka pendidikan kewarganegaraan telah diajarkan di sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Namun dalam kurun waktu sampai sekarang ini sudah beberapa kali PPKn berganti istilah atau nama. Pertama PPKn menggunakan nama Civic, kemudian pada tahun 1975 diganti Pendidikan Moral Pancasila. Pada tahun 1992 namanya diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada Tahun tahun 2004 namanya diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pada Tahun 2013 ada pergantian lagi kurikulum 2013, nama PKn diganti lagi dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (Civic Education) merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2005 : 33). Sedangkan Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warganegara yang cerdas, partisipatif

dan bertanggung jawab yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia yang cerdas. (Depdiknas, 2005 : 33)

Berdasarkan pengertian dan visi PPKn, dapat dinyatakan bahwa PPKn merupakan pendidikan politik bagi warga Negara yang berfungsi untuk membentuk warga Negara yang baik yaitu warga Negara yang cerdas, terampil, saling menghormati sesama, mengetahui hak dan kewajibannya dan berkaraktek setia kepada bangsa dan negara Oleh karena itu mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai ciri khas yang berbedanya dengan yang lain. Ciri khas PPKn dapat dilihat dari sasaran atau tujuan yang akan dicapai yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan kewarganegaraan serta karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan yang konprehensif untuk menjadi warga Negara yang baik.

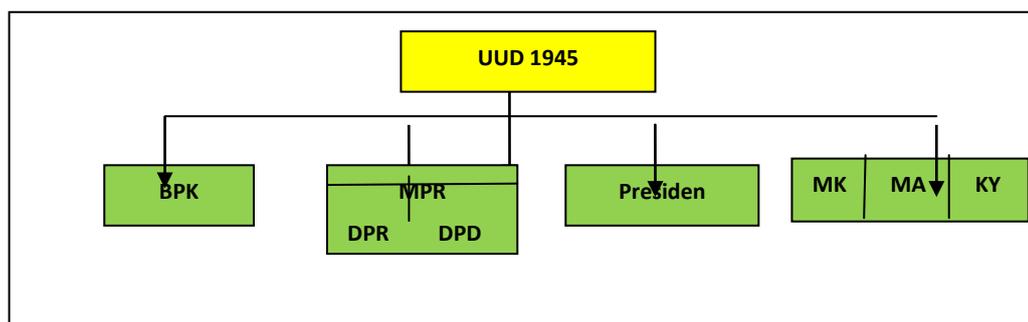
Materi pelajaran PPKn memiliki tiga ciri khas, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan karakter kewarganegaraan. Tiga hal tersebut merupakan bekal bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik. Ketiga materi tersebut dicantumkan dalam kompetensi-kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran PPKn. Kompetensi tersebut digolongkan menjadi 3 kelompok. 1) Kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. 2) Kemampuan untuk memiliki ketrampilan kewarganegaraan. 3) Kemampuan untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan. Rincian Kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan
 - a. Memahami tujuan pemerintah dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional, serta bagaimana warganegara membentuk kebijaksanaan publik.
 - c. Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara – negara dan bangsa-bangsa lain serta masalah-masalah dunia internasional.
- (2) Kompetensi untuk memiliki ketrampilan kewarganegaraan
 - a. Mengambil dan menetapkan keputusan yang tepat melalui proses masalah dan inkuiri.
 - b. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu.
 - c. Menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu.
 - d. Membela dan mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis dan rasional.
 - e. Memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum.
 - f. Membangun kualisi, kompromi, negosiasi dan konsensus.
- (3) Kompetensi untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan
 - a. Memperdayakan dirinya sebagai warga negara yang Independen, aktif, kreatif, tanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat, politik, dan masyarakat pada semua tingkatan daerah maupun nasional.
 - b. Memahami bagaimana warga negara melakukan peranan hak dan kewajiban personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkat.
 - c. Memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Memahami dan menerapkan prinsip hak asasi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Lembaga-Lembaga Negara

Setelah amandemen UUD 1945 terdapat perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya penyempurnaan kelembagaan negara dan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini membawa konsekuensi adanya perubahan skema kedudukan lembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945 ada lembaga tertinggi negara dan ada lembaga tinggi negara. Setelah amandemen UUD 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi maupun tinggi negara yang ada hanya lembaga-lembaga negara.

Skema Lembaga Negara Menurut Amandemen UUD 1945



Lembaga negara adalah suatu badan yang diberi wewenang oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945. Di negara Indonesia Lembaga negara telah diatur di dalam UUD 1945. Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen memang ada perbedaan dibandingkan dengan lembaga negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen. Perbedaan tersebut terdapat pada hal-hal berikut ini.

- (1) Lembaga – lembaga negara mempunyai kedudukan yang seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikat.
- (2) Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga lembaga negara lainnya.
- (3) Terdapat lembaga-lembaga negara yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) .
- (4) Terdapat lembaga negara yang dihapus yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

2. Penilaian Otentik

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Dalam kehidupan akademik keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian autentik, tidak lazim digunakan.

Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, karena, asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai.

Kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian proyek. Asesmen autentik adakalanya disebut penilaian responsif, suatu metode yang sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, hingga yang jenius. Asesmen autentik dapat juga diterapkan dalam bidang ilmu tertentu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi utamanya pada proses atau hasil pembelajaran. Asesmen autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena

penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan atas tugas-tugas yang harus mereka lakukan.

Asesmen autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik, karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek. Asesmen autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan.

Asesmen Autentik meniscayakan proses belajar yang Autentik pula. Menurut Ormiston belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Asesmen semacam ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual bagi peserta didik, yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimilikinya. Contoh asesmen autentik antara lain keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi dan bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu.

Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahahi aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang luar sekolah. Di sini, guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi. Peserta didik pun tahu apa yang mereka ingin pelajari, memiliki parameter waktu yang fleksibel, dan bertanggungjawab untuk tetap pada tugas. Asesmen autentik pun mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru.

Sejalan dengan deskripsi di atas, pada pembelajaran autentik, guru harus menjadi “guru autentik.” Peran guru bukan hanya pada proses pembelajaran, melainkan juga pada penilaian. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria tertentu seperti disajikan berikut ini.

- (1) Mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran.
- (2) Mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumberdaya memadai bagi peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuan.
- (3) Menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik.
- (4) Menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia di luar tembok sekolah.

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Penilaian Kompetensi Pengetahuan, Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian Kompetensi Keterampilan, Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi.

Ada beberapa penelitian yang relevan untuk dikaji. Esti Setiawati (2004) melakukan penelitian pengembangan instrumen evaluasi budipekerti siswa SMU Negeri di Kabupaten Bantul dengan subyek seluruh siswa SMU Negeri di Kabupaten Bantul. Hasil analisis data uji coba pengembangan instrumen adalah menunjukkan angka KMO and Barlet's Test sebesar 0,875 dengan $p < 0,05$ menghasilkan 1 butir tidak layak analisis. Reliabilitas sebesar 0,963 menunjukkan reliabilitas instrumen yang tergolong tinggi namun validitas instrumennya masih rendah.

Siti Hamidah (2011) melakukan penelitian pengembangan model pembelajaran soft skill yang dapat diintegrasikan, yaitu kerjasama dalam tim, strategi berfikir, kemampuan untuk selalu belajar, kemampuan untuk mengembangkan potensi, komunikasi, orientasi pada tujuan, disiplin, pemecahan masalah, kreativitas, usaha keras untuk mencapai kesuksesan, menghadapi dan mengelola rasa takut, profesionalisme, komitmen dan tanggung jawab.

Endang Sulistiyowati (2008) di dalam disertasinya yang berjudul pengembangan instrumen Soft Skills Mahasiswa Bahasa Inggris membagi Soft Skill menjadi empat kemampuan yaitu kemampuan strategis, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi dan kemampuan psikologi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang saya sampaikan di atas dapat diketahui hasilnya berikut ini.

1. Bentuk faktual penilaian pembelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Karangawen.

Guru Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Karangawen ada 3 orang. Satu guru mengajar di kelas 9, dua guru mengajar di kelas 7 dan 8. Guru yang mengajar di kelas 9 memang tidak melaksanakan penilaian otentik. Guru tersebut hanya melaksanakan teknik penilaian tradisional. Namun kedua guru yang lain dituntut untuk melaksanakan penilaian otentik. Ketika guru melaksanakan proses pembelajaran, guru juga harus melaksanakan penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh guru kelas 7 dan 8 adalah penilaian otentik. Penilaian itu meliputi baik proses maupun hasil belajar. Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Penilaian inilah yang membuat bingung guru-guru di SMP Negeri 1 Karangawen. Drs. Muhkaris adalah salah satu guru PPKn di SMP Negeri 1 Karangawen mengatakan “ kalau tugas guru harus melaksanakan penilaian dengan berbagai macam teknis akan membuat guru stres, karena tidak dapat menyusun instrumen yang baik (wawancara, 12 September 2014). Begitu juga berdasarkan observasi terhadap instrumen penilaian sikap yang dipakai bapak Imam wahyu sebagai guru PPKn, dia telah melaksanakan penilaian sikap. Akan tetapi instrumen yang dipakai masih yang bersifat umum.

Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas guru di SMP Negeri 1 Karangawen masih belum mampu melaksanakan penilaian otentik. Ketidak mampuan itu dikarenakan guru belum menguasai bagaimana cara membuat instrumen penilaian. Banyak guru dalam menyusun instrumen penilaian tidak membuat pemetaan atau kisi-kisi terlebih dahulu. Mereka dalam membuat instrumen penilaian khususnya aspek pengetahuan juga tidak memperhatikan tingkatan soal dalam taksonomi Blom. Guru dalam menentukan bobot atau tingkat kesukaran butir soal hanya di dasarkan perkiraan saja.

Setelah mereka mengikuti pelatihan kurikulum 2013 mereka sedikit-sedikit tahu tentang kurikulum 2013. Mereka juga mempelajari bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dengan

pendekatan saintific. Mereka juga mempelajari bagaimana penilaian otentik itu. Setelah mempelajari penilaian otentik itu mereka malah tambah pesimis. Mereka berfikir apakah guru-guru maupun sekolah mampu melaksanakannya. Penilaian otentik menuntut guru dapat mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan teknik yang akan digunakan. Pekerjaan ini pada dasarnya merupakan pekerjaan yang baru dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Penilaian pada kurikulum 2006, guru tidak perlu membuat penilaian sikap dan ketrampilan. Guru hanya melaksanakan penilaian pengetahuan saja. Namun setelah diberlakukan kurikulum 2013 guru harus membuat penilaian sikap dan ketrampilan selain penilaian pengetahuan. Akibatnya guru menghadapi kendala-kendala, yaitu: (1) guru belum bisa mengembangkan rubrik penilaian sikap dan ketrampilan, (2) untuk melaksanakan penilaian otentik memerlukan kertas yang banyak, dan (3) adanya salah satu guru PPKn di SMP Negeri 1 Karangawen yang belum mahir mengoperasikan komputer. Hal-hal tersebut yang menjadi kendala pelaksanaan penilaian otentik di SMP Negeri 1 Karangawen.

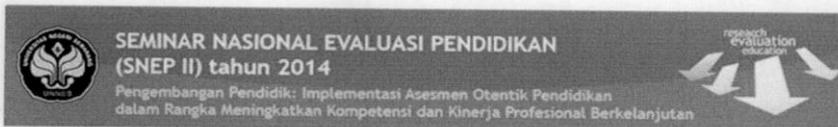
2. Untuk permasalahan yang ke-2 sampai yang ke-4 belum dapat diketahui hasilnya karena belum dilaksanakan penelitian secara empirik.

Penutup

1. Kondisi faktual guru-guru di SMP negeri 1 Karangawen masih belum melaksanakan penilaian otentik karena terkendala belum dapat mengembangkan instrumen penilaian sikap dan ketrampilan.
2. Untuk permasalahan ke-2 sampai ke-4 belum dapat diketahui hasilnya karena belum dilaksanakan penelitian secara empirik dan ujicoba.

Daftar Pustaka

- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU*, Jakarta : Erlangga.
- Dirjen Pendidikan Dasar Menengah. 2006. *Materi Pelatihan Terintegrasi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Elly M. Setiadi, 2005, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masrukan, 2014, *Asesmen Otentik Pembelajaran Matematika*, Semarang: MIPA Universitas Negeri Semarang
- Mochamad Enoch dkk, , 2004, *Materi Pelatihan Terintegrasi Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2009 *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Pusat Pengembangan Profesi Pendidik. 2014. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Mata pelajaran PPKn*. Jakarta : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjamin Mutu Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007, *Falsafah negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Prestasi Pustaka.



DAFTAR HADIR DISKUSI PARALEL

Ruang : F 11
 Moderator : Dr. Suwito Eko Pramono, M.Si
 Bidang : Riset Pengembangan, Manajemen

No	Pemakalah	Judul	TANDA TANGAN PRESENTASI
1	Dr. Suwito Eko Pramono	Revitalisasi Sistem Evaluasi Pendidikan Sebagai Landasan Terwujudnya Pembangunan Peradaban Bangsa	
2	Lina Wati	Pengembangan Tari Topeng Losari Melalui Mata Pelajaran Seni Budaya Di Tingkat Pendidikan	
3	Rivo Panji Yudha, M.Pd	Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik Unjuk Kerja Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar	X
4	Imron Abu Cholid Wibowo	Peran Supervisi Akademik Pengawas Dan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013	
5	Jefry Deska Setyawan	Pengembangan Media Pembelajaran Lari Simpai Dan Lompat Balok Dalam Pembelajaran Penjasorkes Materi Lompat Jauh Gaya Jongkok SD Berbasis Kurikulum 2013	X
6	Kenya Dwiyaningsih	Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Disiplin Bagi Siswa Sma Melalui Pembelajaran Ppkn Berbasis K 13	X
7	Utsman	Penilaian Otentik Berbasis Kurikulum 2013	
8	Gustom Azmi Agam	Hubungan Fleksibilitas Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Eolgol Dollyo-Chagi Pada Olahraga Taekwondo	

9 Ahmad Soleh Pengembangan Instrumen Penilaian tentang Materi lembaga-lembega negara dalam UUP 1945

10 Ahmad Karul.M. Disin dan Sopral Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Liris

PANITIA SEMINAR NASIONAL EVALUASI PENDIDIKAN (SNEP II)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SABTU 22 NOVEMBER 2014

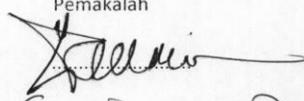
CATATAN PRESENTASI MAKALAH

Ruang : F II
Moderator : SUWITO E.P.
Nama Penyaji : SUWITO EKO PRAMONO
Instansi/Asal PT : PPS UNNES
Judul : REKULTUISAN SISTEM EVALUASI

Nama Penannya : AHMAD SOLEH.
Instansi/Asal PT : PPS UNNES

Pertanyaan : Kalau menurut saya, perbaikan evaluasi pendidikan kesekolah. Sistem penilaian sebaiknya dimulai dari sistem UN. Karena dengan adanya UN yang digunakan dan itu standar penentuan kelulusan sangat mempengaruhi guru dan siswa. Bagaimana mnt Bapak?

Jawaban : Pada dasarnya, saya berpendapat bahwa UN harusnya memang mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Guru lebih banyak melakukan role model dan pada kreativitas pembelajaran. UN sebaiknya di-hentikan.

Pemakalah

Suwito E.P.